

## ABSTRAK

**Salsa Ayuning Tias:** *“Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Ditinjau dari Siyasah Dusturiyah.”*

Permasalahan sampah baik itu sampah rumah tangga ataupun sampah sejenis sampah rumah tangga di Kabupaten Garut khususnya di Kecamatan Sukawening menjadi salah satu topik yang tidak pernah usai untuk diperbincangkan. Tentunya ada beberapa faktor yang berpengaruh terhadap permasalahan sampah itu sendiri. Salah satunya adalah bagaimana mekanisme penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah dan yang kedua adalah sikap masyarakat terhadap permasalahan sampah di lingkungannya. Pemerintah Kabupaten Garut mengatur hal-hal itu di dalam Perda No 4 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Penelitian ini dilakukan untuk menjawab rumusan masalah, Bagaimana Mekanisme Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah Sesuai Perda Nomor 4 Tahun 2014?, Bagaimana Dampak Ketersediaan Sarana dan Prasarana Terhadap Kondisi Kebersihan di Kecamatan Sukawening?, dan Bagaimana Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Mekanisme Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah dan Dampaknya Terhadap Kebersihan di Kecamatan Sukawening?

Faktor pendukung pelaksanaan hukum terdiri dari hukum itu sendiri, penegak hukumnya, fasilitas pendukung, faktor masyarakat, serta kebudayaan. Dalam konsep siyasah dusturiyah ada beberapa prinsip dan juga teori, salah satunya yaitu teori tujuan negara menurut Al-Mawardi dalam kitab *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah*. Beliau berpendapat bahwa negara didirikan dengan tujuan untuk menggantikan tugas kenabian dalam memelihara agama dan mengelola dunia.

Metodologi penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu kualitatif deskriptif. Dan menggunakan teknik wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Selanjutnya diolah menjadi hasil berupa penjabaran, bukan angka-angka.

Setelah dilakukan penelitian terhadap permasalahan di atas, penulis mendapatkan bahwa mekanisme penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah di Kecamatan Sukawening belum jelas dan terperinci. Tetapi, dampak terhadap kebersihan di Kecamatan Sukawening itu sendiri tidak terlalu mencolok hingga tidak menimbulkan kesan kumuh di kecamatan tersebut. Ditinjau dari siyasah dusturiyah dalam salah satu kaidahnya yaitu apabila suatu peraturan tidak bisa dilaksanakan seluruhnya maka jangan ditinggalkan seluruhnya, dalam hal ini meskipun tidak adanya Perbup yang seharusnya menjadi pedoman dari teknis lebih lanjut sesuai Perda Nomor 4 Tahun 2014 tetap dalam pelaksanaannya beberapa desa ada yang melaksanakan perda tersebut.

**Kata kunci:** Peraturan Daerah, Mekanisme, Dampak, Siyasah Dusturiyah